

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN, USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO KECIL (UMKM) PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Salsa Bila Maulida Putri¹, Siti Raudah², Ana Maryati³

Program Studi Adminstrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: salsabilamaulidaputrii@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ada adalah kurangnya pembinaan bagi pelaku UMKM, sulitnya penyaluran dana UMKM dan tidak tepatnya penerima sasaran UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini. Pertama, koordinasi sudah optimal yang dilakukan pada setiap 3 bulan sekali. Kedua, kerjasama kurang optimal yang mana para pelaku UMKM kurang bisa memasarkan produk. Ketiga, sumberdaya manusia belum optimal dimana jumlah petugas masih minim. Keempat, sumberdaya finansial belum optimal dimana lambatnya penyaluran dana. Kelima. fasilitas belum optimal dimana fasilitas minim. Kenam, wewenang sudah optimal dimana menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada UMKM. Ketujuh, komitmen sudah optimal dimana adanya jadwal pelaksanaan. Kedelapan, SOP sudah optimal dimana adanya aturan yang sesuai. Kesembilan, fragmentasi sudah optimal dimana menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada UMKM. Faktor penghambat adalah kurang bisa memasarkan produk, kurangnya jumlah petugas, lambatnya penyaluran dana UMKM dan minimnya fasilitas bagi UMKM. Sedangkan faktor pendukung adanya perencanaan kegiatan, adanya pertemuan dengan pelaku UMKM dan adanya penyuluhan yang dilakukan. Saran kepada Kepala pembinaan UKM lebih ditingkatkan dan di arahkan agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan terbina dengan baik, Kepada Kepala Bidang UMKM agar mempromosikan produk UKM dan para Pelaku UMKM dapat menerima perubahan teknologi informasi yang begitu cepat dengan tujuan untuk mudah

Kata Kunci: Implementasi, Program Pemberdayaan UMKM, Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

The existing problems are the lack of coaching for MSME actors, the difficulty of distributing MSME funds and the inappropriateness of MSME target recipients. The research method used is descriptive and qualitative using data collection techniques: interviews, observations, and documentation. The results of this study. First, coordination has been optimal which is carried out every 3 months. Second, cooperation is less than optimal where MSME actors are less able to market their products. Third, human resources are not optimal where the number of officers is still minimal. Fourth, financial resources are not optimal where the distribution of funds is slow. Fifth. facilities are not optimal where facilities are minimal. Sixth, authority is optimal where guidance and counseling is carried out for MSMEs. Seventh, commitment is optimal where there is an implementation schedule. Eighth, SOP is optimal where there are appropriate regulations. Ninth, fragmentation is optimal where guidance and counseling is carried out for MSMEs. Inhibiting factors are the inability to market products, the lack of officers, the slow distribution of MSME funds and the lack of facilities for MSMEs. Meanwhile, supporting factors include activity planning, meetings with UMKM actors, and counseling. Suggestions to the Head of UMKM development are to be improved and directed so that community welfare is increased and well-maintained, to the Head of UMKM to promote UMKM products and UMKM actors can accept changes in information technology that are so rapid with the aim of making it easy

Keywords: Implementation, UMKM Empowerment Program, Hulu Sungai Utara Regency

PENDAHULUAN

Sebagai langkah untuk memajukan kemampuan serta peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekonomi negara, pemberdayaan ini perlu dilaksanakan secara menyeluruh, bersinergi, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Meskipun UMKM telah menunjukkan kontribusinya dalam perekonomian nasional, mereka masih menghadapi beragam tantangan dan kesulitan dalam meningkatkan kapabilitas usaha yang sangat kompleks, yang saling terkait, antara lain minimnya modal baik dari segi jumlah maupun sumber, keterbatasan dalam manajemen dan keterampilan operasional, serta tidak adanya bentuk formal perusahaan, lemahnya struktur organisasi, dan pemasaran yang terbatas. Selain itu, persaingan yang tidak sehat dan tekanan ekonomi juga menyebabkan ruang lingkup usaha menjadi sempit.

Berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh UMKM menunjukkan bahwa masalah pendanaan masih menjadi salah satu aspek penting bagi mereka, baik dalam memenuhi kebutuhan modal operasional maupun untuk investasi dalam pengembangan bisnis. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam mendukung UMKM di samping mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dan kecil, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tingkat produktivitas mereka masih rendah. Kesulitan bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing disebabkan oleh berbagai tantangan yang rumit. Hambatan-hambatan tersebut muncul dari berbagai faktor, termasuk manajemen yang kurang baik, keterbatasan modal, kekurangan keterampilan, tantangan pemasaran, dan teknik produksi yang tidak memadai.

Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memungkinkan wilayah untuk menciptakan kemandirian dalam konteks kesatuan dan persatuan bangsa sesuai UUD 1945. Selain itu, adanya kebijakan otonomi daerah ini juga membawa konsekuensi berupa upaya pengembangan dan peningkatan daerah melalui perimbangan keuangan yang adil antara pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah langkah strategis untuk meningkatkan dan memperkuat fundamental kehidupan ekonomi rakyat Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

Secara hukum, komitmen pemerintah tercermin dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang memiliki tujuan untuk menjadikan usaha kecil sebagai pilar utama dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Undang-Undang ini diikuti oleh peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 mengenai Kemitraan, yang merupakan salah satu inisiatif untuk menciptakan iklim usaha melalui kolaborasi antara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Usaha Besar, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mayoritas inisiatif untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih menekankan pada aspek pendanaan, terutama dari bank dan lembaga keuangan, serta pendampingan bagi UMKM. Banyak dari program ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan ultramikro. Penelitian menunjukkan bahwa sejumlah usaha mikro ragu untuk mengambil dana yang ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan dampak dari program pemberdayaan UMKM, pemerintah bertekad untuk menyelaraskan program-program tersebut. Dalam strategi ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan mengambil peran penting dalam mengatur kebijakan, program, dan pengumpulan data terkait program UMKM serta para peserta atau penerima program. Namun, untuk melaksanakan koordinasi dengan baik, Kementerian Koperasi dan UKM membutuhkan dukungan dalam bentuk regulasi dan perubahan struktur organisasi. Salah satu langkah tersebut adalah meningkatkan tingkat organisasi sebagai koordinator pelaksana program pemberdayaan UMKM, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu sektor penggerak perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disebut UMKM. Adapun jumlah UMKM yang ditangani oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni sebanyak 34.377 dari 10 kecamatan yang ada di 7 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan rincian sebagai berikut: Usaha Mikro sebanyak 29.372, Usaha Kecil sebanyak 5.406 dan Usaha Menengah sebanyak 401, dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM secara keseluruhan 34.377.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan tambahan pasal yang menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM adalah koordinator pelaksana keseluruhan program pemberdayaan UMKM tingkat nasional dan berhak menyelenggarakan sistem basis data terpadu lintas sektor serta sistem pengawasan dan evaluasi program. Meningkatkan kategori kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kategori I untuk melaksanakan fungsi penyelarasan kebijakan khusus UMKM dan Meningkatkan alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk membangun basis data dan pelaporan program pemberdayaan UMKM lintas sektor di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan pemberdayaan UMKM yang berupa pelatihan, pembinaan, dan bantuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

1. Pelatihan UMKM dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, teknik produksi, dan penggunaan bahan baku. Pelatihan juga dapat mencakup perencanaan strategis, manajemen keuangan, pemasaran, dan manajemen operasional.
2. Bantuan alat produksi dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan efisiensi produksi UMKM.
3. Program KUR merupakan program pemerintah yang memberikan akses pembiayaan kepada UMKM. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas permodalan usaha.
4. Program pembinaan ini merupakan kebijakan yang menjadi pedoman bagi Satuan Kerja di Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM.

Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung pengembangan UMKM dengan membeli produk lokal dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam permasalahan terkait UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Utara beberapa permasalahan didapatkan setelah melakukan observasi lapangan yaitu:

1. Kurangnya pembinaan bagi pelaku UMKM dimana pada Kabupaten Hulu Sungai Utara pelaku UMKM semakin tahun mengalami penurunan karena bangkrut, dimana dalam pembinaan tersebut kurang dari pembinaan manajemen keuangan dan pemasaran. Adanya masalah teknologi, terutama dalam pengelolaan keuangan serta mencakup perencanaan strategis dalam mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas khususnya dalam bidang penguasaan teknologi pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dimana pelaku UMKM kurang bisa memasarkan produk secara menarik ataupun online sehingga dalam pemasaran yang dilakukan terbatas dan kurangnya kreativitas pelaku UMKM terhadap produknya.
2. Sulitnya penyaluran dana UMKM pada Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk pelaku UMKM, mekanisme dan prosedur yang sangat rumit serta berbelit-belit sehingga dalam pencairan dana UMKM tidak tepat dengan waktunya, dimana syarat tersebut sangat sulit bagi pelaku UMKM

untuk memenuhinya dan penyaluran dana UMKM terhambat untuk pelaku UMKM tersebut, dimana dalam pelaku UMKM hanya 35% dari 100% yang memenuhi dalam syarat untuk penyaluran dana bagi pelaku UMKM. (Sumber : Data Pelaku UMKM)

3. Tidak tepatnya penerima sasaran UMKM dimana belum adanya database tunggal terkait dengan UMKM. Waktu pendataan dan penyaluran yang sangat terbatas juga menjadi masalah ketepatan penyaluran sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan, dimana berdasarkan klasifikasi usaha dan kluster usaha pada Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat yang mana berjumlah 34.377 UMKM, dimana dalam klasifikasi usaha pada Kabupaten Hulu Sungai Utara ada 3 macam yaitu Usaha mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, hal ini sangat banyak pada Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaku UMKM, sehingga dalam ketepatan penyaluran tidak terkoordinasi dengan baik, akan tetapi yang dapat bantuan berupa uang hanya beberapa saja. (Sumber : Data Pelaku UMKM, 2024)

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Implementasi Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

METODE

Penulis dalam penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jalan Bihman Villa Nomor 31 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Telpon. 0527-61304. Emaildisperindagkop@hulu.sungaiutara.go.id. Kode Pos 71416.

Pendekatan penelitian adalah suatu skema tentang cara penelitian akan dilaksanakan. Skema ini dipakai untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian explanatory, yakni penelitian yang mengkaji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan hipotesis yang perlu dibuktikan.

Tipe survei yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif atau disebut juga deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian deskriptif berfokus pada penyelesaian masalah yang sedang terjadi saat ini. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan cara untuk menganalisis data yang ada, seperti yang berkaitan dengan kondisi yang dihadapi.

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2014:245) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau keperpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

Sumber Data menurut Sugiyono (2014:225) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila riset menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya, maka sumber data dikenal sebagai informan, yaitu individu yang memberikan respons dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi sehingga sumber data juga disebut informan. Informan merujuk pada individu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi data. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai infoeman kunci.

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2014:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang

memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	2	3
George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan	1. Komunikasi	a. Koordinasi b. Kerjasama
	2. Sumberdaya	a. SDM b. Sumberdaya finansial c. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Wewenang b. Komitmen
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP b. Fragmentasi

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014:217) sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik penggalian data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.

2. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Implementasi Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Implementasi Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun presentasi, pada fase ini metode yang paling sederhana untuk maju adalah dengan membagi inovasi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen tertentu, menggunakan ini sebagai garis matriks. Sisi vertikal matriks mencakup periode waktu, mulai dari penggunaan awal hingga penggunaan selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada elemen selama periode

tersebut, kita dapat menambahkan penjelasan singkat mengenai perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14).

2. Memasukkan informasi. Pada fase ini, peneliti sedang mencari perubahan yang terjadi pada inovasi, elemen demi elemen. Perubahan tersebut dapat dicatat dalam catatan lapangan wawancara dengan pengguna inovasi yang telah diberi kode, yang secara khusus ditanya apakah mereka telah menciptakan sesuatu yang sudah diberi kode dalam buku inovasi.
3. Menganalisis informasi. Pada fase ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dengan merujuk kembali kepada elemen lain dari catatan lapangan, terutama informasi tambahan yang diberikan oleh orang-orang mengenai perubahan tersebut atau alasannya. Proses analisis informasi dalam penelitian kualitatif berlangsung sejak sebelum ke lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah meninggalkan lapangan.

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (dalam Patimah 2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Penelitian yang berjudul Implementasi Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan menunjukkan bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian, melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang lama serta yang baru. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kedekatan antara peneliti dan narasumber agar semua informasi dapat diungkap tanpa ada yang ditutupi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Dengan cara ini, data dan rangkaian kejadian dapat dicatat dengan tepat dan teratur. Dengan cara meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi.

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan rujukan dalam konteks ini adalah keberadaan saksi yang dapat membuktikan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Informasi mengenai hubungan antar manusia atau deskripsi suatu situasi perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Peralatan untuk merekam informasi dalam penelitian kualitatif, seperti kamera dan alat perekam suara, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

4. *Member check*

Member check merupakan langkah untuk memverifikasi informasi yang didapat oleh peneliti dari sumber data. Tujuan dari member check adalah untuk menilai seberapa akurat data yang diperoleh dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh sumber data.

PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah jenis program dari pemerintah pusat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-undang ini juga memuat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Di dalamnya dinyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksana seluruh program pemberdayaan UMKM di tingkat nasional

dan memiliki hak untuk mengatur sistem data terintegrasi antar sektor serta sistem pemantauan dan penilaian program. Kementerian Koperasi dan UKM diberikan peningkatan kategori kewenangan menjadi kategori I untuk menjalankan fungsi penyaluran kebijakan yang khusus mengenai UMKM, sekaligus meningkatkan dana anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk membangun sistem data dan pelaporan terkait program pemberdayaan UMKM di tingkat nasional dan daerah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal.

Indikator koordinasi sudah terimplementasikan dimana adanya koordinasi yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan pelaku UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada setiap 3 bulan sekali dalam penyelenggaraan program yang dilakukan. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam pemberdayaan UMKM terkait koordinasi memang dilakukan koordinasi ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya bagi pengembangan produk UMKM yang aktif dalam pengembangannya.

Indikator kerjasama kurang terimplementasikan yang mana para pelaku UMKM kurang bisa memasarkan produk secara menarik ataupun online sehingga dalam pemasaran yang dilakukan terbatas dan kurangnya kreativitas pelaku UMKM terhadap produknya. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam pemberdayaan UMKM terkait kerjasama kurang terimplementasikan. Para pelaku UMKM kurang bisa memasarkan produk secara menarik ataupun online sehingga dalam pemasaran yang dilakukan terbatas dan kurangnya kreativitas pelaku UMKM terhadap produknya.

Sumber daya adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut

Indikator sumberdaya manusia belum terimplementasikan dengan baik dimana jumlah petugas pada bidang UMKM di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana masih minim sehingga dalam bimbingan kepada para pelaku UMKM tidak terkoordinasi dengan baik, hal ini menyebabkan kurangnya terpenuhi kebutuhan serta strategi yang dilakukan untuk mengembangkan UMKM pada Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pemberdayaan UMKM terkait sumberdaya manusia belum terimplementasikan dimana kurangnya jumlah petugas sehingga dalam pelaksanaan UMKM kepada para pelaku tidak efektif dalam pelaksanaannya, dimana para pelaku UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat banyak

Indikator sumberdaya finansial kurang terimplementasikan dimana sumberdaya finansial Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya membantu akses permodalan kepada para pelaku UMKM sehingga para pelaku UMKM terkendala dengan modal. Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pemberdayaan UMKM terkait sumberdaya finansial belum terimplementasikan dimana lambatnya penyaluran dana UMKM pada Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk pelaku UMKM, mekanisme dan prosedur yang sangat rumit serta berbelit-belit sehingga dalam pencairan dana UMKM tidak tepat dengan waktunya.

Indikator fasilitas belum terimplementasikan dimana fasilitas yang diberikan untuk para pelaku UMKM memang masih minim, tidak adanya fasilitas untuk para pelaku UMKM pada Kabupaten

Hulu Sungai Utara, sehingga para pelaku UMKM tidak berkembang dengan baik dalam pelaksanaannya. Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pemberdayaan UMKM terkait fasilitas belum terimplementasikan karena fasilitas yang diberikan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara memang belum ada sehingga sulitnya perkembangan UMKM terhambat

Disposisi, merupakan sifat dan karakter yang dimiliki oleh pelaksana, seperti loyalitas, integritas, dan sikap demokratis. Jika pelaksana memiliki disposisi yang positif, maka pelaksana tersebut mampu melaksanakan kebijakan sesuai harapan pembuat kebijakan. Saat pelaksana memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan

Indikator wewenang sudah terimplementasikan dimana wewenang yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada UMKM serta memfasilitasi pembiayaan untuk perkuatan modal UMKM. Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pemberdayaan UMKM terkait wewenang sudah terimplementasikan dimana Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengadakan pemberdayaan UMKM sesuai dengan peraturan yang ada dengan menjalankan tugas penyesuaian kebijakan yang berfokus pada UMKM. Selain itu, meningkatkan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk membangun database serta pelaporan program pemberdayaan UMKM yang mencakup berbagai sektor di tingkat nasional dan daerah

Indikator komitmen sudah terimplementasikan dimana pelaksanaan kepada pelaku UMKM dimana petugas pada bidang UKM melakukan sesuai dengan tugasnya yaitu melakukan pembinaan serta pengembangan dalam pelaksanaan UMKM yang ada ataupun menjamin perlindungan kepada pelaku UMKM. Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pemberdayaan UMKM terkait komitmen dimana Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang UKM serta membangun dan mengembangkan usaha UKM

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan)

Indikator SOP sudah terimplementasikan dimana adanya aturan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang dijalankan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan proses penyelenggaraan bisnis UMKM. SOP dapat menjadi kunci kesuksesan dalam membangun usaha UMKM. Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pemberdayaan UMKM terkait SOP sudah terimplementasikan hal ini sesuai dengan penyelenggaraan UMKM dimana Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan sesuai dengan SOP

Indikator fragmentasi sudah terimplementasikan dimana tanggung jawab yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada UMKM serta memfasilitasi pembiayaan untuk perkuatan modal UMKM. Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pemberdayaan UMKM terkait fragmentasi sudah terimplementasikan dimana Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan dalam pemberdayaan UMKM sesuai dengan aturan yang berlaku dimana melaksanakan tugas penyesuaian kebijakan yang berkaitan dengan UMKM serta meningkatkan penganggaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyusun sistem data dan

pelaporan untuk program penguatan UMKM di berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam melakukan sebuah peningkatan pasti mendapatkan suatu hambatan atau kendala. Berikut ini diuraikan lebih lanjut mengenai hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Faktor penghambat adalah pelaku UMKM kurang bisa memasarkan produk secara menarik ataupun online sehingga dalam pemasaran yang dilakukan terbatas dan kurangnya kreativitas pelaku UMKM terhadap produknya.

Jumlah petugas pada bidang UMKM di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana masih minim sehingga dalam bimbingan kepada para pelaku UMKM tidak terkoordinasi dengan baik, hal ini menyebabkan kurangnya terpenuhi kebutuhan serta strategi yang dilakukan untuk mengembangkan UMKM pada Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya membantu akses permodalan kepada para pelaku UMKM sehingga para pelaku UMKM terkendala dengan modal.

Fasilitas yang diberikan untuk para pelaku UMKM memang masih minim, tidak adanya fasilitas untuk para pelaku UMKM pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga para pelaku UMKM tidak berkembang dengan baik dalam pelaksanaannya

Faktor pendukung adanya perencanaan kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan pelaku UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada setiap 3 bulan sekali dalam penyelenggaraan program yang dilakukan

Adanya pertemuan dengan pelaku UMKM ataupun pada tiap Kecamatan yang ada pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana sosialisasi dilakukan pada Kecamatan yang ada pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada UMKM serta memfasilitasi pembiayaan untuk perkuatan modal UMKM.

SIMPULAN

Implementasi Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal hal ini dapat dilihat dari indikator: *Pertama*, koordinasi sudah optimal dimana adanya koordinasi yang dilakukan pada setiap 3 bulan sekali. *Kedua*, kerjasama kurang optimal yang mana para pelaku UMKM kurang bisa memasarkan produk. *Ketiga*, sumberdaya manusia belum optimal dimana jumlah petugas pada bidang UMKM masih minim. *Keempat*, sumberdaya finansial belum optimal dimana lambatnya penyaluran dana UMKM. *Kelima*, fasilitas belum optimal dimana fasilitas yang diberikan untuk para pelaku UMKM memang masih minim. *Kenam*, wewenang sudah optimal dimana wewenang yang dilakukan menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada UMKM. *Ketujuh*, komitmen sudah optimal dimana adanya jadwal pelaksanaan yang dilakukan dengan pelaku UMKM. *Kedelapan*, SOP sudah optimal dimana adanya aturan yang sesuai dengan SOP. *Kesembilan*, fragmentasi sudah optimal dimana Dinas Koperasi

Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada UMKM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi dua yaitu Faktor penghambat adalah kurang bisa memasarkan produk dari indikator kerjasama, kurangnya jumlah petugas dari indikator sumberdaya manusia, lambatnya penyaluran dana UMKM dari indikator sumberdaya finansial, minimnya fasilitas bagi UMKM dari indikator fasilitas. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya perencanaan kegiatan dari indikator koordinasi, adanya pertemuan dengan pelaku UMKM dari indikator komitmen dan adanya penyuluhan yang dilakukan dari indikator wewenang dan SOP.

Kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara pembinaan UKM lebih ditingkatkan dan di arahkan agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan terbina dengan baik serta mampu menyerap dan mengurangi jumlah angka pengangguran, sehingga program ini nantinya dapat berjalan lebih efektif dan bermanfaat. Meningkatkan SDM pelaku serta menambah pegawai pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengelola pengawasan UMKM berkelanjutan kedepannya.

Kepada Kepala Bidang UMKM agar mempromosikan produk UKM sehingga bisa menembus pasar dalam Daerah maupun luar Daerah melalui kegiatan Expo dan bekerja dengan semua pusat perbelanjaan seperti indomaret, dan lain-lain.

Kepada para Pelaku UMKM dapat menerima perubahan teknologi informasi yang begitu cepat dengan tujuan untuk mudah mendapatkan akses informasi bisnis yang berguna bagi usahanya

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Nurhaeni Jaya, 2022. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu. Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.

Wilda Karunia Eka, 2019. Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan). Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang Semarang

Abdul Wahab solichin. 2015. Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarata: Edisi Kedua

Agustino, Leo. 2018. Dasar-dasar kebijakan publik. Edisi revisi, Bandung: Alfabeta.

Edward. 2013. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran. Yogyakarta : Gava Media.

Hotlina Sihombing, 2020. Implementasi Program Jemput Bola Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ktp-El Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Program Studi Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Indiahono, Dwiyanto. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media.

Islamy, 2015. Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara dalam Pemerintahan. Surabaya : Gava Media.



- Mansyur, Makbul 2014. Implementasi Kebijakan Publik Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas. Bandung : Alfabeta
- Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. Metode penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014, Metode Penelitian Kualitatif Bandung : Alfabeta Bandung
- Sinambela, 2015. Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara
- Tangkilisan, 2013. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi. Pemikiran, Yogyakarta:Y.A.P.
- Tim Penyusun, 2023. Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai.





